

ORTODOKSI VERSUS HETERODOKSI: ISLAM DAN POLARISASI MEDIA DI INDONESIA MENJELANG PILPRES 2014

Alimahtusadiyah

Forum Komunikasi Gusdurian Yogyakarta

Abstrak: *Perdebatan mengenai relasi Islam dan Negara tidak pernah benar-benar padam dalam konteks politik di Indonesia. Perdebatan tersebut tidak pernah lepas dari tarik akar perdebatan sesungguhnya disekitar wacana hubungan Islam dan Negara yaitu Islam ortodoksi dan Islam heterodoksi. Aliran ini sesekali muncul dan mengemuka dalam momentum-momentum penting suksesi kepemimpinan nasional seperti pada pilpres tahun 2014. Seperti yang kita ketahui pilpres 2014 silam, terdapat dua pasang calon presiden yang diusung oleh gabungan partai politik yang berlatar belakang partai yang beraliran ortodoksi dan heterodoksi. Kendati kedua pasangan calon sama-sama didukung oleh partai politik yang berasal dari aliran ortodoksi dan heterodoksi di Indonesia, namun anggapan masyarakat terhadap kedua pasangan telah terbentuk terutama tidak terlepas dari andil media massa. Dari sinilah yang menjadi titik tekan bagaimana gambaran aliran politik Islam di Indonesia, apakah aliran politik Islam masih relevan untuk membaca dinamika politik di Indonesia dan bagaimana wacana ortodoksi dan heterodoksi Islam dalam pemberitaan media menjelang pilpres 2014. Dalam memahami realita diatas sangat relevan dijabarkan melalui teori konstruksi sosial dan analisis wacana model Norman Fairclough yang memberikan fokus terhadap tiga dimensi yaitu : pertama, analisis mikrostruktur (proses produksi) dimana analisis ini dilakukan dengan menganalisis teks dengan cermat dan focus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarkan representasi teks. Kedua, analisis mesostruktur (proses interpretasi), yaitu dengan memfokuskan pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks. Dan ketiga, analisis makrostruktur (proses wacana) yaitu menganalisis fenomena dimana teks dibuat. Berdasarkan pembahasan terhadap aliran politik Islam di Indonesia menunjukkan secara umum peta aliran politik di Indonesia belum berubah secara signifikan. Peta politik yang ada menunjukkan adanya kecenderungan kalangan pemilih ortodoks yang masih mempertahankan motif lama dalam pentas politik nasional. Mereka mempertahankan alasan memilih berdasarkan landasan keagamaan (Islam). Selanjutnya, kalangan modernis atau heterodoks yang*

berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Ortodoksi dan Heterodoksi, Islam dan Negara, Polarisasi Media.

A. Pendahuluan

Perdebatan mengenai relasi Islam dan Negara tidak pernah benar-benar padam dalam konteks politik Indonesia. Perdebatan tersebut selalu muncul dalam momen-momen krusial suksesi kekuasaan di negeri ini. Kemunculan isu tersebut mengalami fluctuative discourse dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu survive pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Hal tersebut tidak terlepas dari tarik akar perdebatan sesungguhnya di sekitar wacana hubungan Islam dan Negara yaitu islam ortodoks dan islam heterodoks. Aliran konservatif atau ortodoks, yang berpendapat Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, oleh sebab itu tidak ada alasan memisahkan keduanya. Sementara aliran modernis atau heterodoks, yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Kemudian muncul aliran ketiga yaitu aliran sekuler yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena menurut aliran ini Muhammad tidak pernah mengepalai dan mendirikan negara.¹

Aliran-aliran di atas selalu muncul dan mengemuka dalam momentum-momentum penting suksesi kepemimpinan nasional seperti pada pilpres tahun 2014. Seperti diketahui bahwa pada pilpres 2014 silam, terdapat dua pasang calon presiden yang diusung oleh gabungan partai politik. Pasangan pertama yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung oleh Patai Golkar, PAN, PPP, PKS dan PBB. Sementara pasangan kedua adalah Joko Widodo dan Moh. Jusuf Kalla yang diusung oleh PDIP, PKB, Partai NASDEM, Partai HANURA, dan PKPI.

Kendati kedua pasangan calon sama-sama didukung oleh para ulama yang berasal dari organisasi mainstream di Indonesia, namun

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: UI, 1990), hlm. 1-2.

anggapan masyarakat terhadap kedua pasangan telah terbentuk terutama tidak terlepas dari andil media massa. Media massa dibutuhkan untuk mempromosikan figur-figur yang diusung oleh partai politik sebagai capresnya supaya lebih dikenal luas oleh khalayak. Baik mengenai profil, *track record*, maupun program-programnya yang akan dijalankan oleh capres tersebut. Banyak dari partai politik kemudian menjadikan media massa sebagai *partner* dalam kegiatan-kegiatan partai politik, khususnya selama masa kampanye terbuka. Sebab media massa diakui sebagai sarana komunikasi, penyambung kata atau ucapan yang paling ampuh dalam membantu kegiatan-kegiatan politik. Pada masa kampanye para marketing politik termasuk kandidat politik (calon eksekutif) lebih banyak berhubungan dengan masyarakat melalui media massa. Selain jangkauannya sangat luas, pengguna jasa media massa tidak harus menemui masyarakat dari satu tempat ketempat lain.²

Dalam dunia komunikasi, media massa atau *mass media* secara umum diakui sebagai sarana komunikasi yang paling efektif untuk mempengaruhi khalayak. Melalui media massa, khalayak dapat mengakses segala macam informasi yang dibutuhkan. Baik mengenai pendidikan, kebudayaan, sosial, budaya maupun politik dan pemerintahan. Inilah kekuatan dari pada media massa. Ia bisa menjadi penyalur pesan-pesan yang baik untuk segala bentuk informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sayangnya, kekuatan yang ada pada media massa itu pada perkembangannya disalahgunakan oleh pemiliknya. Mereka yang punya kekuasaan atas media tersebut menjadikan media massa sebagai penyalur kepentingan individu dan juga kelompok – tanpa mau memperdulikan kepentingan yang lebih besar untuk mengedukasi khalayak secara positif. Akibatnya, media mengalami disfungsi orientasi dan cenderung melenceng dari esensinya sebagai pilar keempat demokrasi.

Realitas inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap berita-berita yang dihadirkan oleh media terkait dengan ortodoksi dan heterodoksi Islam di Indonesia menjelang Pilpres 2014. Penelitian ini dimaksudkan agar khalayak mampu melakukan filter dan melakukan pembacaan terhadap media massa secara kritis, sehingga kelak dapat menjadi pemilih yang cerdas demi terwujudnya Indonesia baru yang lebih baik.

Research question yang menjadi focus dalam kajian tulisan ini adalah: (1) Bagaimana gambaran aliran politik Islam di Indonesia? (2)

² Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis –Mutualisme Media dan Politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hlm. 58.

Apakah aliran politik Islam masih relevan untuk membaca dinamika politik di Indonesia? Dan (3) Bagaimana wacana ortodoksi dan heterodoksi Islam berkolerasi dengan politik aliran dalam pemberitaan media menjelang pilpres 2014?

B. Wacana Identitas dan Relasi Sosial dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial

Untuk mendiskusikan persoalan wacana identitas dan relasi sosial yang dikonstruksi dalam realitas simbolik, maka penelitian ini menggunakan pendekatan teori konstruksi sosial Berger dan Lucmann. Akan tetapi, terlebih dahulu penulis perlu memperjelas mengenai konsep-konsep terkait seperti konsep identitas sosial dan teori wacana media.

1. Teori Konstruksi Sosial

Bertolak dari paradigma sosiologi George Ritzer³, maka kajian ini sejalan dengan paradigma definisi sosial yang mengakui manusia adalah aktor kreatif dalam realitas sosialnya. Artinya tindakan individu tidak sepenuhnya dipengaruhi dan ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang ada di sekelilingnya yang semuanya itu tergambar dalam struktur dan pranata sosial.

Oleh karena itu paradigma ini berkesimpulan bahwa dalam proses sosial manusia adalah pencipta realitas yang relatif bebas dalam dunia sosialnya. Paradigma definisi sosial di atas akan memberikan penguatan terhadap teori konstruksi sosial.

Menurut teori Berger dan Luckman proses konstruksi sosial berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yakni *realitas subjektif, realitas simbolik, dan realitas objektif*.

a. Realitas Objektif

Merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang semua itu dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. Realitas objektif adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan.

b. Realitas Simbolik

Merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai realitas objektif termasuk di dalamnya teks produk industri media,

³ G. Ritzer & Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm 82

atau representasi pasar dan kapitalisme dalam media. Realitas simbolik merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk.

c. Realitas Subjektif

Realitas subjektif merupakan konstruksi definisi realitas seputar pasar yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objektivikasi, memunculkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru. Realitas subjektif merupakan realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi.

2. Media dan Pemberitaan

Media massa dalam beberapa kasus lebih cenderung melibatkan interpretasi dan persepsi ke dalam sebuah isu yang diangkat. Sebuah isu-isu tertentu diangkat secara dominan melebihi isu-isu yang lainnya, sebagai sebuah upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh media massa, isu-isu itu kemudian dikemas dan diceritakan kedalam teks berita.

Sebagai mana Burhan Bungin memandang bahwa setiap upaya “menceritakan” sebuah peristiwa, keadaan, benda, atau apapun, sebagai sebuah usaha mengkonstruksikan realitas.⁴ Upaya untuk menjadikan sebuah peristiwa atau isu berada pada interpretasi secara tepat, sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemilik media. Sehingga teks menjadi suatu produk yang bermakna dan memiliki arti tertentu bagi khalayak. Hal ini yang disebut kontruksi berita.⁵

Kita ambil contoh Tv One dan AnTv beserta media yang tergabung dalam group member Viva secara dominan memberitakan sosok Abu Rizal Bakrie (ARB) dan partai Golongan Karya (Golkar) dalam porsi yang lebih dominan dibandingkan dengan isu-isu politik lainnya.

Contoh lain seperti MetroTV yang secara dominan menempatkan isu-isu politik partai Nasional Demokrat (NasDem) beserta agenda-agenda politik Surya Paloh, yang berlangsung selama masa kampanye terbuka pemilu legislatif 2014, menjadi bukti adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh media massa tertentu. Yaitu untuk mempersepsikan Surya Paloh dan Partai Nasdem, kepada khalayak sebagai

⁴ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2008), hlm. 88.

⁵ Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideolog dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKis, 2002), hlm. 141.

figur dan partai politik yang bersih, peduli rakyat kecil, berdedikasi untuk perubahan, sehingga layak dipilih oleh rakyat.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut sejatinya adalah realitas yang dikonstruksikan, bukanlah cerminan sebuah realitas. Realitas yang dibuat melalui teks berita, yang didukung visualisasi berita dengan melibatkan interpretasi dan pembentukan persepsi.

Tidak bisa dipungkiri, ada banyak “intervensi” dalam ruang dimana teks itu diproduksi yang didorong oleh berbagai macam kepentingan dalam suatu struktur organisasi media. Disini pemilik media atau pemilik modal memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memberikan “intervensi”-nya. Ia merupakan pemangku kepentingan yang paling utama.

Biasanya, pemilik media massa ini memberikan intervensinya melalui pendekatan-pendekatan ideologis, politis dan juga bisnis, atau salah satu diantaranya yang berbaur sebagai sebuah kesatuan visi dan misi media tersebut. Sehingga intervensi yang dilakukan dapat memberikan pengaruh bagi interpretasi teks yang diproduksi.

3. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Wacana kritis Norman Fairclough adalah proses analisis teks sebagai mikrolevel, analisis proses sebagai mesolevel dan analisis sosial sebagai makrolevel. Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough membagi analisis wacananya dalam tiga dimensi yang meliputi analisis teks (menurut Fairclough, analisis teks ini disebut pula dengan analisis linguistik. Teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosa kata, semantik dan tata kalimat).

Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, bagaimana antar kata atau antar kalimat digabung sehingga membentuk pengertian atau wacana. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut. *Pertama*, ideasional atau representasi yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu.

Analisis ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks atau berita yang bisa mengandung seperangkat ideologis tertentu. Representasi ini menurut Fairclough ditelaah dalam tiga hal, yakni bagaimana seseorang, kelompok dan gagasan ditunjukkan dalam anak kalimat, dalam kombinasi anak kalimat serta dalam rangkaian antar kalimat.

Untuk representasi dalam anak kalimat, pemakai bahasa baik jurnalis maupun reporter sejatinya dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, pada tingkat pilihan kata atau kosakata. Kedua, pilihan yang didasarkan pada tingkat tata bahasa. Apakah peristiwa tertentu hendak ditampilkan

sebagai sebuah tindakan, peristiwa, keadaan, atau hanya sebagai proses mental. Ciri bentuk tindakan adalah anak kalimatnya berstruktur transitif (subjek dan kata kerja dan objek). Sedangkan untuk bentuk peristiwa, memiliki anak kalimat intransitif (subjek/objek dan kata kerja).

Untuk representasi dalam kombinasi anak kalimat koherensi antara anak kalimat memiliki beberapa bentuk. Pertama, elaborasi, anak kalimat satu menjadi penjelas dari anak kalimat yang lain, dengan memakai kata sambung 'yang,' 'lalu' atau 'selanjutnya.' Kedua, perpanjangan, bisa memakai kata hubung 'dan.' Ketiga, mempertinggi, dengan kata hubung 'karena' atau 'diakibatkan.' Untuk representasi dalam rangkaian antar kalimat, maka dua atau lebih kalimat disusun, di mana satu kalimat lebih menonjol dibandingkan dengan kalimat lainnya.

Selanjutnya, untuk aspek relasional tekstual, yaitu bagaimana pola hubungan antara wartawan dengan khalayak; antara partisipan publik (tokoh) dengan khalayak, dan antara wartawan dengan partisipan publik, ditampilkan dalam teks. Untuk aspek identitas tekstual ini berkaitan dengan bagaimana jurnalis mengidentifikasi dirinya dalam teks, sebagai bagian dari khalayak atau kelompok dominan ataukah menempatkan dirinya secara mandiri.

Sementara itu, analisis proses merupakan dimensi yang berkaitan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Misalnya saja wawancara mendalam dengan redaksi dan pembaca (informan) yang berkaitan dengan tema studi ini, dan atau mengamati news room. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informannya, namun pada terjawabnya tujuan penelitian.⁶

Langkah terakhir, yakni analisis sosial. Konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana muncul dalam media. Pada langkah ini, praktik secara sosiokultural terdiri atas tiga tahap yaitu:⁷ (1) Level Situasional, yakni Teks berita dihasilkan dalam kondisi atau suasana yang khas, sehingga ada kemungkinan satu teks berbeda dengan teks lain untuk satu kasus; (2) Level Institusional, yakni Pengaruh institusi organisasi dalam produksi wacana, di antaranya adalah pengiklan, oplah atau rating dan persaingan antar media; dan (3) Level Sosial, yakni Wacana yang muncul dalam media ditentukan pula oleh faktor perubahan masyarakat. Penelitian ini berpondasi pada paradigma konstruksionis Peter L. Berger, yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas natural, melainkan hasil dari konstruksi. Media massa bukan suatu

⁶ Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 53.

⁷ Eriyanto. *Analisis Wacana*, (Yogyakarta.LKiS.2001), hlm. 322.

cerminan dari suatu fakta riil, melainkan fakta yang sudah direkonstruksi. Fakta yang sebenarnya adalah apa yang dilihat oleh wartawan, dan bukan apa yang ditulis dan diinterpretasikan oleh wartawan, apalagi setelah diterbitkan oleh suatu media massa.

Paradigma ini mempunyai penilaian tersendiri bagaimana media massa, wartawan, dan berita itu dilihat. Hal ini berpondasi pada suatu asumsi tidak mungkin ada sebuah teks berita yang tidak melalui proses-proses “campur tangan” pihak-pihak dalam struktur organisasi media. Teks berita tidak muncul dengan sendirinya, melainkan lahir dari sebuah pandangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

Dalam pandang Herbert J. Gans, realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Menurut pengertian ini tidak ada realitas yang bersifat objektif, sebab realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Dengan kata lain, berita merupakan sebuah hasil konstruksi, sedangkan media massa dan wartawan sebagai agen konstruksi.

Karenanya, Alex Sobur memandang pekerjaan media pada hakekatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media menurut Sobur, adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilih, diantaranya realitas politik. Isi media adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai bahasa dasarnya.

Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berbagai teks berita yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis. Yaitu berita-berita terkait ortodoksi dan heterodoksi Islam dalam pemberitaan media menjelang pilpres 2014. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber informasi lain yang dapat melengkapi data baik berupa buku-buku, jurnal, dan media online.

Dalam penelitian ini literature research dilakukan terhadap berita-berita kecenderungan media secara general, dan secara spesifik terhadap sejumlah teks berita ataupun yang dimuat dimedia tersebut. Selain melalui teknik studi pustaka, penulis juga menggunakan studi dokumentasi sebagai referensi pendukung dalam mengumpulkan data. Baik itu berupa buku-buku, jurnal, dan media online maupun dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya. Data dikelompokkan ke dalam fokus permasalahannya, kemudian data tersebut dibahas dengan menggunakan instrumen analisisnya dengan menggunakan konsep konstruksi sosial. Norman Fairclough dalam CDA, mengungkapkan proses analisis dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi secara simultan yaitu analisis teks, analisis proses, dan analisis sosial.

Analisis wacana model Norman Fairclough memberikan fokus terhadap tiga dimensi yaitu sebagai berikut : pertama, analisis

mikrostruktur (proses produksi). Analisis mikrostruktur yaitu dengan menganalisis teks dengan cermat dan fokus supaya dapat memperoleh data yang dapat menggambarkan representasi teks. Dan juga secara detail aspek yang dikejar dalam tingkat analisis ini adalah garis besar atau isi teks, lokasi, sikap dan tindakan tokoh tersebut. Penyajian data dilakukan dengan memotong adegan-adegan (teknik printscreen) dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat, sehingga data yang diambil menjadi lebih tertata dengan baik dan memudahkan penulis dalam melakukan analisa.

Kedua, analisis mesostruktur (proses interpretasi), yaitu dengan memfokuskan pada dua aspek yaitu produksi teks dan konsumsi teks. Tahap ini dapat dilakukan dengan melihat pemberitaan media terpilih perihal tema pilpres kaitannya dengan ortodoksi dan heterodoksi. Ketiga, analisis makrostruktur (proses wacana) yaitu menganalisis fenomena dimana teks dibuat. Proses produksi wacana tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dilahirkan dari konteks tertentu. Oleh karena itu, analisis makrostruktur yaitu menelusuri konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks untuk menemukan realitas pada teks.

C. Ortodoksi Versus Heterodoksi Islam dalam Wacana Perpolitikan di Indonesia

a. Relasi Islam dan Negara di Indonesia

Relasi Islam dan Negara di Indonesia dapat dirunut panjang ke belakang hingga sejak munculnya perdebatan soal makna, penafsiran dan fungsi pancasila telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia, setidaknya sejak bangsa ini merdeka, perdebatan ini selalu menjadi aktual di kalangan akademisi dan politisi Indonesia sampai saat ini. Apalagi didorong dengan lahirnya beberapa Partai Islam, permintaan diberlakukannya *syariat Islam* di Aceh (NAD), munculnya teroris-teroris yang berkedok Islam, laskar serta organisasi yang bernafaskan Islam kanan, di antaranya Laskar Jihad, Hizbu Tahrer, Jaringan Islamiyah dan Front Pembela Islam (FPI). Selain itu yang paling jelas menjadi indikator perlunya kejelasan relasi Islam dan negara dalam kehidupan berbangsa terlihat pada menguatnya ide-ide pencantuman *Syari'at Islam* dalam amandemen UUD 45 setiap ST MPR hasil pemilu 1999.⁸

Hal ini juga sering terjadi dalam wacana politik Indonesia di penghujung tahun 1990-an yang juga sibuk memperdebatkan ideologi dan

⁸ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir, cet. ke-1* (Bandung: Teraju, 2002), hlm. xi.

peristiwa-peristiwa politik yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini, di antaranya mengenai hubungan Islam dan negara, peran ABRI dalam politik, dan bentuk demokrasi yang sesuai dengan negara ini.⁹ Dalam skripsi ini penulis menitikberatkan pada masalah yang pertama yaitu mengenai hubungan Islam dan negara.

Untuk memperjelas tahap-tahap perjuangan umat Islam Indonesia dalam merespon perdebatan Islam dan negara. M. Rusli Karim membagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, 1912 hingga proklamasi kemerdekaan, tahap kedua 1945-1955, tahap ketiga, 1955-1965 dan tahap keempat 1965 sampai sekarang.¹⁰

Mengingat wacana negara Islam di Indonesia selalu menjadi perdebatan panjang dalam sejarah didirikannya negara ini, sejak pra-kemerdekaan sampai sekarang. Patut dicari apa sebenarnya yang membuat tokoh muslim berkeinginan keras meletakkan Islam sebagai dasar negara Indonesia? Salah satu jawaban atas pertanyaan ini, yaitu karena mereka bertujuan menerapkan *Syari'at* secara efektif di seluruh penjuru wilayah negara, M. Natsir salah satu tokoh Islam yang kontra dengan gagasan Soekarno mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu cita-cita Islam oleh sebab itu pencapaian kemerdekaan Indonesia merupakan bagian integral dari perjuangan Islam untuk menerapkan *Syari'at*.

b. Ortodoksi dan Heterodoksi dalam Politik Indonesia

Suatu hal yang wajar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia wacana relasi Islam dan negara mendapatkan komentar, kritik dan debat yang tajam karena masalah ini termasuk kategori *Ijtihad* seseorang dalam memahami teks Tuhan.

Diawali perdebatan antara Natsir dan Soekarno, akhirnya Islam mencari jalannya sendiri dalam kehidupan sosial politiknya dengan cara yang bisa dibidang formalistik, agar kehadirannya tidak hanya dirasakan tapi juga diakui. Dalam pandangan umum, langkah-langkah ini telah menempatkan Islam dalam posisi antagonistik *vis-a-vis* negara dengan seluruh implikasinya.¹¹

⁹ Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia : Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. Ke-1, (Yogyakarta, Mata Bangsa, 2002), hlm. 16.

¹⁰ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 21.

¹¹ Bahtiar Effendy, (RE) *Politisasi Islam, Pernahkah Islam Berbenti Berpolitik?*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 191.

Akhirnya, situasi inilah yang mendorong pemikir Islam Indonesia generasi kedua (sejak tahun 1970-an), yang kemudian sering disebut sebagai kelompok “Islam kultural”. Dalam pandangan ini Islam politik merupakan sesuatu yang sulit untuk dijual karena trauma politik yang membekas para aktivis politik saat itu, baik dari pihak Islam politik maupun negara. Untuk itu generasi kedua ini tidak menginginkan Islam dijadikan sebuah ideologi, dengan memfokuskan pada bidang garapan “transformasi sosial” yang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Di antaranya pandangan dasar Nurcholish Madjid yang mengemukakan desakralisasi; Abdurrahman Wahid dengan gagasan Pribumisasi Islam,¹² Dawam Rahardjo yang menggeluti Masyarakat pedesaan melalui pesantren; dan Munawir Sjadzali yang menyatakan perlunya melihat Islam dalam konteks Indonesia.¹³

Sebenarnya kalau dilihat dari aspek politik, aktivitas Islam kultural dan Islam politik mempunyai persamaan, karena kalangan inilah yang meletakkan dasar-dasar kehidupan politik yang demokratis, dengan menonjolkan aspek-aspek keadilan, musyawarah, dan egalitarianisme yang disesuaikan dengan *spirit* Islam. Lebih spesifik dalam pembahasan ini, Munawir Sjadzali mengklasifikasikan relasi Islam dan negara menjadi tiga kategori.

Pertama, aliran konservatif atau ortodoks, yang berpendapat Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, oleh sebab itu tidak ada alasan memisahkan keduanya. Di antara para tokoh aliran ini ialah Rasyid Ridha dan Al-Maududi. *Kedua*, aliran modernis atau heterodoks, yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Tokoh yang terkemuka yaitu M. Husein Haikal. *Ketiga*, aliran sekuler, Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena menurut aliran ini Muhammad tidak pernah mengepalai dan mendirikan negara. Tokoh utama aliran ini ialah Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein.¹⁴

Akan tetapi dalam tipologi ini, penulis akan mengkaji pada kategori kedua, yakni aliran Modernis, yang kemudian penulis

¹² Yang dimaksud Pribumisasi Islam adalah bagaimana mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Jadi bukan meninggalkan norma demi budaya, akan tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan pemahaman nash, yaitu fiqh dan qaidah fiqh. Lihat Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam” dalam *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 83.

¹³ Bahtiar Effendy, (RE) *Politikasi Islam*., hlm. 191.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*., hlm. 1-2.

klasifikasikan kembali menjadi dua aliran: modernis dan neo-modernis. Pemetaan ini didasarkan pada analisa pemikiran yang telah berkembang, bahwa pemikiran politik Islam di Indonesia memang tidak lepas dari hubungan dialektis antara aliran tradisional dan modernis, yang akhirnya melahirkan neo-modernisme tersebut.

Dalam pandangan politik Islam, kelompok modernis biasanya menggunakan pendekatan struktural yang dapat juga disebut sebagai kaum idealis, sementara kelompok neo-modernis menggunakan pendekatan kultural yang biasa disebut kaum realistik atau akomodasionis.

Pemikiran modernisme Islam sudah dimulai sejak abad ke 20-an sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1912 didirikan sarakat Islam, yakni sebuah organisasi politik Islam modern pertama kali di Indonesia yang didasarkan pada sebuah prinsip antipenjajahan.¹⁵ Di bawah pengaruh modernisme Islam, nilai-nilai demokrasi menjadi suatu yang lazim di kalangan intelektual muslim prakemerdekaan.¹⁶

Menurut Mukti Ali, munculnya Modernisme karena didorong kesadaran akan kemunduran umat Islam yang disebabkan telah meninggalkan sumber ajaran al-Qur'an yang asli, Oleh sebab itu kalangan modernisme seringkali menyerukan umat Islam untuk "kembali kepada al-Qur'an dan sunnah secara murni".¹⁷ Sebagai reaksi terhadap Barat, wajar apabila kalangan modernisme mengagendakan sebuah *apologia* melalui "ideologisasi Islam" bahwa Islam adalah agama yang *Kaffah*.

Dalam konteks pembahasan, perspektif ini dihadapkan penulis pada pemikiran M. Natsir. Tokoh ini dikategorikan dalam perspektif modernis karena gagasannya yang rasional-fundamental, penulis katakan rasional-fundamental karena satu sisi Natsir mengakui bahwa di dalam Islam juga mengandung unsur-unsur demokrasi, dalam artian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bermanfaat bagi rakyat atau dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,¹⁸ sisi fundamentalnya, M. Natsir bersikap keras meletakkan Islam sebagai dasar negara, dengan tujuan supaya ajaran Islam bisa dilaksanakan secara utuh dan konsekuen dalam kehidupan bernegara.¹⁹

¹⁵ Anders Uhlin, *alib Bahasa Rafik Subud, Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia, cet. ke-2* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 32.

¹⁶ Deliar Noer, *Pengantar ke pemikiran politik*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 215-216.

¹⁷ Moslem Abdurrahman, *Islam Transformatif cet. Ke-2* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 28.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Konfigurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama Dan Orde Baru, dalam, M. AS. Hikam, dkk., Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), hlm. 20.

¹⁹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, (Magelang: IndonesiaTera, 2001), hlm. 98.

Ide-ide pemikiran modernisme tentang Islam dan negara cenderung bercirikan konservatif, liberal dan demokratis sosial.²⁰ Di Indonesia sendiri menurut Dawam Rahardjo ciri yang menonjol dari kalangan modernisme adalah “apologik”, pemurnian dan “skripturalistik”,²¹ sedangkan dalam pandangan Liddle istilah modernisme dalam politik mempunyai dua corak, *pertama*, “skripturalistik”-yang masih menginginkan bentuk negara Islam dan berlakunya undang-undang Islam; *kedua*, “substansialis”-kelompok ini lebih mengedepankan pada isi daripada bentuk.²²

Untuk memperjelas pada pembahasan lebih lanjut, perlu penulis tegaskan bahwa yang dimaksud modernisme di sini adalah aliran pemikiran yang asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebenarnya secara genetik kelompok ini sudah ada sebelum Orde Baru lahir, yaitu Masyumi dan Muhammadiyah.²³ Kedua organisasi ini mempunyai pemikiran yang sama dalam memandang konsep negara, menurut tokoh-tokoh modernis, Islam dan negara mempunyai hubungan integral, tetapi bukan berarti menolak sistem Barat secara totalitas. Karena menurut M. Natsir sendiri Islam memang tidak mempunyai sistem ketatanegaraan yang sempurna, maka dari itu apabila negara Islam nanti didirikan boleh mengadopsi sistem Barat asal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.²⁴

Pada intinya aliran modernisme semacam ini mendukung negara Islam secara ideologis, karena baginya secara tekstual, al-Qur’an dan Sunnah telah menunjukkan perangkat dasar negara yang dapat diterapkan di zamannya.²⁵ Selain itu, masih ada alasan-alasan lain yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, mengapa tokoh modernisme seperti M. Natsir ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

D. Dinamika Politik Aliran dalam Pentas Perpolitikan di Indonesia

a. Dinamika Perpolitikan Indonesia: Suatu Tinjauan Terhadap Ideologi Partai Politik Indonesia

²⁰ Bahtiar Effendy dan Fachry Ali, *Merambab Jalan Baru Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 171. Baca juga, Anders Uhlén, *Oposisi Berserak*, hlm. 77.

²¹ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 284. lihat juga, M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran*, hlm. 211.

²² M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran*, hlm. 211, lihat karya asli William Liddle, *Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia*. *kertas kerja belum diterbitkan*.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara.*, hlm. 70-72.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 73

Membahas tentang politik Indonesia, maka perlu ditelusuri geneologi partai politik secara ideologis. Jika membahas tentang ideologi politik Indonesia, maka dapat ditelusuri dan dipahami dari berbagai pemikiran yang telah dikemukakan oleh para tokoh politik maupun akademisi pada era tahun 1950-an. Toloh politik antara lain Soekarno (1964) yang mengkategorikan ideologi partai politik ke dalam Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom). Kelompok Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama oleh Masyumi dan NU sedangkan Komunis direpresentasi oleh PKI.

Sementara itu, dikalangan akademisi pengelompokan ideologi partai dikemukakan Feith dan Castles²⁶ yang membagi ideologi partai politik ke dalam Nasionalisme Radikal (PNI), Tradisionalisme Jawa (PNI-PKI-NU), Islam (NU, Masyumi), Sosialisme Demokratis (PNI-Masyumi) dan Komunisme (PKI). Lebih lanjut Feith membuat lima kutub aliran, yaitu, Islam, Nasionalisme Radikal, Sosialisme, Komunisme, dan Tradisionalisme Jawa. Tumbuhnya kelima aliran itu dipengaruhi oleh dua sumber utama, yakni: khasanah Barat (modern) dan domestik (Hindu-Budha dan Islam). Dari situlah mengejawantah heterogenitas partai. Feith melihat kelima aliran itu saling terkait (cross-cutting). Nasionalisme radikal dengan representasi PNI terkait dengan NU; Islam dengan representasi Masyumi bersama NU; Tradisionalisme Jawa dengan representasi Partindo terkait PNI dan NU; sedangkan sosialisme demokrat dengan representasi PSI terkait Masyumi dan PNI. Kecuali aliran komunisme yang diwakili PKI yang menjadi kutub terpisah sendiri.

Selanjutnya, Daniel Dhakidae membagi ideologi partai mengikuti tipologi masyarakat yaitu kelompok Nasionalis (PDI-P), Pembangunan (Golkar), Agama (PBB) dan Sosialisme (PRD).²⁷ Sedangkan Suryadinata mengkristalkan kembali pemikiran dan aliran politik yang ada ke dalam dua kategori besar, yaitu, Pancasila dan Islam Politik (*Political Islam*).²⁸

Soekarno dengan pemetaan ideologi partai-partai dan masyarakat tanah air telah berjasa mengantar Indonesia ke gerbang kemerdekaan, yaitu: Islam, Nasionalisme, dan Marxisme. Ketika Soekarno menerapkan kekuasaan demokrasi terpimpin, ketiga aliran itu dikemasnya menjadi doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis). Pemikiran

²⁶ Herbert Feith & Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 21.

²⁷ Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Starategi dan Program* (Jakarta: Tim Litbang Kompas, 1999), hlm. 17.

²⁸ Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa (Kasus Indonesia)*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 12.

Soekarno itu sudah banyak mendapatkan kritik karena dianggap hanya mewakili potret masyarakat Jawa dan sejak keruntuhan Orde Baru.

Dalam realitasnya, keberadaan partai-partai politik di Indonesia baik pada Pemilu 1999, 2004 2009, bahkan tahun 2014 selalu mencerminkan kedua aliran tersebut yaitu Partai Nasionalis dan Partai Agama yakni Islam. Guna menyederhanakan penyebutan terhadap kecenderungan dua aliran tersebut, ada yang menyebut sebagai partai sekuler dan partai Islam. Penyebutan partai sekuler untuk yang berada di kubu Nasionalis, dan partai Islam untuk yang berada di partai agama.²⁹

Bila dibedakan berdasarkan ideologi atau asas yang dianut parpol-parpol tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Parpol peserta pemilu mengambil dua ideologi dasar yang sudah dikenal rakyat Indonesia sejak Indonesia baru mengecap kemerdekaan, yaitu ideologi yang nasionalis dan Islamis serta ideologi yang telah 'dimodifikasi' sedemikian rupa, yang menjadikan ideologi yang dipakai seolah nasionalis, atau seolah islamis, bahkan ideologi yang seolah nasionalis islamis atau islamis nasionalis. Sebenarnya rakyat Indonesia cukup familiar dengan satu ideologi lagi yang telah absen dari perpolitikan Indonesia sejak ditetapkannya sebagai ideologi terlarang dengan adanya TAP MPRS No : XXV/MPRS/1966, yaitu ideologi komunis.

b. Politik Aliran: Relevansi dalam Tarik Ulur Kepentingan Politik Praktis

Pada pemilu 2004, merupakan pemilu pertama yang dilakukan secara langsung setelah pasca amandemen UUD 1945. Dalam pemilu 2004 pemilihan legislatif dilakukan dengan cara proporsional terbatas dengan memilih gambar sehingga penentuan calon anggota DPR berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan oleh partai. Sedangkan dalam pemilihan Presiden dilakukan secara langsung bukan lagi melalui MPR.³⁰ Ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6A Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: "presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Dalam pemilihan legislatif, Partai Golkar yang di ketuai oleh Akbar Tandjung menjadi pemenang pemilu dengan 24.480.757 suara atau

²⁹ Budhy –Rachman Munawar, Moh Shofan, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 142.

³⁰ Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 terjadi perubahan dalam tata cara pemilihan. Kalau pemilu 1999 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR secara terpisah sedangkan dalam pemilu 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan oleh rakyat secara langsung melalui partai politik sendirian maupun gabungan.

21,58% disusul PDI-P, PKB, PPP, Partai Demokrat dan seterusnya. Dengan kemenangan di pemilu legislatif membuktikan bahwa Partai Golkar yang selama orde baru sebagai partai penguasa masih mempunyai kekuatan politik nasional yang kuat di era reformasi.

Pada saat menjelang Pilpres, lima partai tersebut berusaha mencari pasangan capres-cawapres yang ideal. Mereka melakukan penajakan dengan cara komunikasi secara intens dengan berbagai parpol dan elemen masyarakat lain supaya mendapatkan dukungan secara massif. Dalam mencari pasangan capres-cawapres tergambar realitas pertarungan nyata antara partai berbasis nasional dan agama.

Golkar bergerak mencari pasangan wapres yang akan dipasangkan dengan Wiranto. Akhirnya, terpilihlah KH. Salahuddin Wahid mantan Komisioner Komnas HAM yang juga sekaligus adik kandung dari mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai pasangan wapres dari Wiranto. Untuk mendukung pasangan ini, Golkar kemudian membangun koalisi dengan PKB agar bisa mendulang suara dari komunitas nahdliyin. PKB sendiri merupakan partai yang berideologi islam kebangsaan, dan mempunyai massa pendukung NU terbesar sehingga memberi kans bagi pasangan Wiranto-Solahuddin untuk mendapat suara dari massa NU. Dalam pemilu legislatif PKB menjadi partai pemenang ketiga dengan memperoleh suara 10,57%.³¹

PDI-P merupakan partai nasionalis yang mengidentifikasi dirinya sebagai partainya wong cilik. Dalam pemilu 2004, PDI-P tidak bisa mengulangi menjadi pemenang seperti pada pemilu 1999, partai ini harus puas menjadi pemenang kedua dengan perolehan suara 18,53%. Menjelang pilpres 2004, PDI-P mengajukan Ketua Umumnya Megawati sebagai kandidat presiden. PDIP masih melihat Megawati sebagai kandidat terbaik di internal partai dan sudah sangat teruji ketika mampu mengatasi kemelut konflik partai ketika berhadapan dengan PDI kubu Soerjadi yang didukung oleh pemerintah Orde Baru. Dukungan kepada Megawati sebagai calon presiden 2004 sebagai harga mati yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga PDI-P tinggal mencari pasangan wapres yang bisa disandingkan dengan Megawati. Akhirnya, pilihan jatuh kepada Hasyim Muzadi yang pada waktu itu masih menjabat Ketua PB NU. Dengan demikian PDI-P berharap dalam pilpres bisa mendapatkan suara dari

³¹ Dalam hal ini, jelas terlihat kepentingan Golkar untuk mendapatkan pasangan capres-cawapres yang merepresentasikan perwakilan nasional-agama.

massa nasionalis, kelompok muslim yang diwakili NU dan juga dari komunitas non muslim yang diwakili massa pendukung PDS.³²

Partai Demokrat merupakan partai yang mengidentikan diri sebagai partai nasionalis religius. Partai berlambang mercy ini bisa dikatakan sebagai partai baru, namun telah membuat kejutan dalam pemilu legislatif dengan menjadi partai pemenang kelima dengan memperoleh 7,45% suara.

Dengan melihat suara yang signifikan, Partai Demokrat yang sejak awal berdirinya sebagai kendaraan politik SBY untuk maju menjadi presiden, langsung bergerak cepat dengan menggandeng Jusuf Kalla (JK) yang merupakan kader Golkar. Pasangan SBY-JK dianggap sebagai pasangan yang representatif karena mewakili dua kutub besar yaitu SBY mewakili kutub jawa sedangkan JK dari luar jawa (sulawesi). Untuk memperkuat dukungan kepada pasangan SBY-JK, Partai Demokrat menggandeng PBB, dan PKPI untuk berkoalisi. Kedua partai terakhir ini dalam pemilu legislatif peringkat delapan dan sembilan dengan memperoleh suara 2,62% dan 1,26%.³³

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai yang mengatas namakan partai islam. Pada pemilu legislatif hanya menempati peringkat keempat dengan mendapatkan 18,5% suara. PPP mengusung capresnya sendiri yaitu Hamzah Haz yang diduetkan dengan Agum Gumelar yang berlatar belakang militer yang nasionalis. Dengan harapan pasangan dari PPP ini mendapatkan dukungan selain dari kelompok muslim juga dari kelompok nasionalis.³⁴

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai yang mempunyai basis dukungan yang jelas dari masyarakat Muhammadiyah, ternyata di luar dugaan hanya menempati peringkat tujuh dengan memperoleh 6,4% suara. Jebloknya suara PAN tidak berarti mengendorkan niat PAN untuk mengusung Amin Rais sebagai capres. Amin Rais memilih Siswono Yudhohusodo sebagai calon wapres dari kalangan sipil yang sebelumnya telah masuk dalam daftar utama tokoh sipil nasionalis yang direkomendasikan PAN. Melihat pasangan Amin Rais-Siswono dianggap sebagai figur yang bisa menjadi representasi dari dua kelompok besar dalam masyarakat Indonesia yaitu muslim dan nasionalis. Amin Rais yang merupakan figur muslim dengan segudang pengalaman

³² Arbi Sanit, *Gagasan Koalisi PDIP-PKS*, 2008, dalam http://www.ui.ac.id/download/kliping/141108/Gagasan_Koalisi_PDIP-PKS.pdf, diakses 19 Mei 2015.

³³ Asep Nurjaman, *Peta Baru Ideologi Partai Indonesia*, 2009. Dalam ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/.../130_umm_scientific_journal.do, hlm. 140

³⁴ *Ibid.*

pernah intensif ikut membentuk ICMI tahun 1991 dan pernah menjadi Ketua Muhammadiyah 1995-2000 bisa membawa bendera islam untuk meraup suara dari kalangan mayoritas muslim. Begitupula Siwono dengan berlatar belakang mantan Ketua Umum GMNI yaitu organisasi mahasiswa yang mempunyai kedekatan sejarah dengan PNI, PDI, dan PDIP. Pernah menjadi Ketua Umum HKTI pada masa orde baru, dan pernah menjadi menteri perumahan rakyat. Harapannya bisa mendulang suara dari kalangan nasionalis.

Untuk memperkuat dukungan terhadap pasangan Amin Rais-Siswono, PAN berkoalisi dengan PKS yang menjadi partai pemenang keenam dengan mendapatkan 7,34% suara. Dukungan dari PKS bisa memperkuat perolehan suara dari kalangan muslim karena PKS selama ini dikenal sebagai partai Da'wah yang menguasai basis islam dipertkotaan terutama dikalangan mahasiswa. Selain berkoalisi dengan PKS, PAN juga berkoalisi dengan partai-partai yang tidak lolos dalam electoral treshold yang suaranya rata-rata dibawah 2,5% seperti PBR, PNBK, PNI Marhaen, PPDI, PSI, PBSB.

Dalam pemilihan Presiden putaran pertama terjadi kejutan yang luar biasa dimana pasangan SBY-JK yang dianggap *underdog* bisa unggul dengan perolehan suara 36.070.622 atau 33.58%, kemudian disusul pasangan Mega-Hasyim yang memperoleh suara 28.186.780 atau 26.24%, pasangan Wiranto-Solahuddin Wahid memperoleh suara 23.827.512 atau 22.19%, pasangan Amin Rais-Siswono Yudho Husodo memperoleh suara 16.042.105 atau 14.94%, dan terakhir pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar memperoleh suara 3.276.001 atau 3.05%.

Maka, berdasarkan ketentuan pada Pasal 6A Ayat 4 UUD 1945 yang maju ke putaran kedua (second round) adalah pasangan SBY-JK dan pasangan Mega-Hasyim. Sedangkan partai-partai yang gagal mengusung calon presiden dan wakil presiden diputaran pertama ada yang memilih bergabung dengan koalisi pasangan SBY-JK dan pasangan Mega-Hasyim, Dan ada juga yang tidak berpartisipasi.

Untuk menyongsong persiapan putaran kedua pasangan SBY-JK membentuk koalisi kerakyatan yang terdiri dari Partai Demokrat, PKPI, PBB dan ditambah dukungan dari partai yang masuk diputaran kedua, yaitu PKS. Sedangkan pasangan Mega-Hasyim membentuk koalisi kebangsaan yang terdiri dari PDI-P, PDS ditambah dukungan dari partai yang bergabung diputaran kedua yaitu Golkar dan PPP. Dalam putaran kedua akhirnya pasangan SBY-JK unggul dari pasangan Mega-Hasyim dengan perbandingan 69.266.350:44.990.704 atau 60,62%:39,38%. Dengan kemenangan pada putaran kedua pilpres 2004, pasangan SBY-JK

terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga yang diselenggarakan selama era reformasi. Dalam pemilu ini telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu ini juga masih menerapkan *electoral threshold* 2,5% kursi DPR, dan menggunakan *parliamentary threshold* dimana partai-partai politik jika tidak memenuhi 2,5% kursi DPR maka suaranya hangus dan tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya kecuali bergabung dengan partai lain atau mengubah nama.

Perubahan juga terjadi dalam persyaratan pemilihan presiden dan wakil presiden, dimana partai politik baik sendirian maupun gabungan dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden apabila memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.³⁵

Dalam pemilu 2009 telah dicerai adanya tindakan inkonsistensi dari partai-partai dengan mengabaikan kesepakatan yang terdapat dalam UU No.12 Tahun 2003 dimana partai-partai yang memperoleh kursi di DPR hasil pemilu 2004 yang gagal mencapai *electoral threshold* 2,5% seharusnya tidak bisa ikut pemilu, namun dibolehkan langsung ikut menjadi peserta pemilu 2009.³⁶ Dengan adanya tambahan dari partai-partai yang tidak lolos *electoral threshold*, pemilu 2009 diikuti oleh tiga puluh delapan partai politik, jumlah ini lebih banyak dari pada peserta pemilu 2004.

Pada pelaksanaan pemilu 2009 terjadi beberapa kejutan dimana Partai Demokrat yang sebelumnya di pemilu 2004 hanya menempati peringkat lima, pada pemilu 2009 menempati peringkat pertama dengan memperoleh suara 20,85%. Kemudian disusul oleh Partai Golkar dan PDI-P. Perolehan suara Partai Demokrat yang cukup signifikan ini tidak terlepas dari daya magnet dari sosok figur SBY. Ini sangat kontras dengan perolehan suara PDI-P yang menurun cukup tajam. Padahal PDIP selama ini dianggap sebagai partai oposisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan SBY-JK. Ternyata, PDI-P tidak bisa menarik simpati masyarakat yang sudah terlanjur menyukai figur SBY terutama dari kalangan ibu-ibu.

³⁵ Pasal 9 UU Pemilu Presiden No 42 tahun 2008.

³⁶ Syamsuddin Haris, UU Pemilu Dari Partai untuk Partai?, Kompas, Senin 3 Maret 2008.

Pemilu 2009 telah menghasilkan sembilan partai politik yang lolos 2,5% suara, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Dari sembilan partai politik yang lolos *parliamentary threshold*, hanya Partai Demokrat yang memenuhi syarat *electoral threshold* yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, sehingga bisa langsung mengusung calon presiden dan wakil presiden secara sendirian. Sedangkan 8 partai yang lain harus membangun koalisi dengan partai lain untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut.

Pemilu 2009 telah menghasilkan kemenangan yang fenomenal bagi Partai Demokrat, namun, dibalik cerita kemenangan itu, banyak kalangan politisi menganggap pemilu 2009 sebagai pemilu yang paling buruk selama Indonesia melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali. Pernyataan itu disampaikan oleh para tokoh dan pimpinan 13 partai politik yang berkumpul di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Adapun para tokoh dan politisi antara lain Megawati (PDI-P), Wiranto (Hanura), Prabowo Subiyanto (Gerindra), Yusril Ihza Mahendra dan MS Ka'ban (PBB), Rizal Ramli, Sutiyoso, dan Gus Dur.³⁷

Sementara itu, pada pileg 2014 perolehan suara partai islam cukup signifikan. Tetapi 3 besar pileg 2014 ini justru diwarnai oleh partai-partai yang notabene beraliran nasionalis. Partai-partai islam hanya berkuat di papan tengah seperti PKB, PKS atau PAN. PBB menjadi satu-satunya partai Islam yang gagal melewati PT berdasarkan *Quick Count* yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga survei.

Islam tak bisa kita lepaskan dari sejarah politik di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pun tak luput dari peran para politikus Islam dan organisasi Islam di Indonesia. Meskipun demikian, secara historis, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu tahun 2009, perolehan suara partai Islam tidak pernah melebihi 50%. Pada tahun 1955, perolehan suara partai Islam diwakili oleh Masyumi dengan 20,98 %, NU (18,41%), Syarikat Islam Indonesia (2,89%), Perti (1,28%) dan 2 partai kecil lainnya, sehingga totalnya 43,93%.³⁸

Pada masa Orde Baru, mulai Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 sampai dengan 1997, perolehan partai Islam yang direpresentasikan oleh PPP (sebagai hasil fusi 4 partai Islam: NU, PSII, Parmusi dan Perti pada tanggal 5 Januari 1973) malah menurun di kisaran 15,97 % – 29,29 %.³⁹ Awal masa reformasi menjadi salah satu momentum

³⁷ Tempo tanggal 15 April 2009.

³⁸ Asep Nurjaman, *Peta Baru Ideologi*, hlm. 144

³⁹ Riswanda Imawan, *Membangun Demokrasi Dalam Siburian e al (eds). Indonesia Raya Bangkit atau Hancur*, (Jakarta:Bina Rena Pariwisata, 2004) ., hlm.31.

kebangkitan partai berhaluan Islam, meskipun direpresentasikan oleh banyak partai Islam, mulai dari PKB, PAN, PK, PNU, PPP, PBB, PSII, Masyumi dan lain-lain. Perolehan suara partai Islam mencapai 37,59%, dipimpin oleh PKB (12,61%) dan PPP (10,72%). Dan prestasi yang cukup membanggakan saat itu adalah ketika kelompok 'Poros Tengah' yang bisa dikatakan sebagai 'Poros Islam' berhasil menggolkan Gus Dur sebagai presiden pertama dari kalangan pesantren.⁴⁰

Tahun 2004, suara partai Islam naik tipis menjadi 38,35%, dengan kontribusi terbesar disumbang PKB (10,57%), PPP (8,15%), dan PKS (7,34%). Namun, ketika Pilpres digelar, suara partai Islam terpecah oleh koalisi yang bersebrangan. PKB dengan PDIP mengusung Mega-Hasyim, PKS sempat gamang antara memilih pasangan Golkar (Wiranto-Wahid) atau Amin-Siswono (PAN), PPP maju dengan pasangannya sendiri Agum-Hamzah. Yang diuntungkan adalah pasangan SBY-JK dari Partai Demokrat yang akhirnya menjadi pemenang pilpres 2004.⁴¹

Tahun 2009, perolehan partai Islam merosot tajam menjadi hanya sekitar 24,15%. Hanya PKS yang membukukan kenaikan perolehan suara menjadi 7,88%. PKB mengalami penurunan yang paling tajam menjadi sekitar 4,94%. Uniknya, pada pilpres 2009, seluruh partai Islam berkoalisi dengan Partai Demokrat, sehingga pilpres pun hanya berlangsung satu putaran karena koalisi yang gemuk bila dibanding kedua rivalnya.

Dari 11 partai politik peserta pemilu menunjukkan melemahnya partai-partai berbasis agama yaitu Islam (PKS, PBB, PPP) dan menguatnya partai beraliran nasionalisme (PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, PKB). Jika kita melihat dari hasil pemilu legislatif 9 April lalu, terlihat bahwa masyarakat masih mempunyai harapan kepada partai dengan nuansa Islam. Sejumlah survei memperkirakan bahwa lima partai Islam yang ikut dalam pemilihan legislatif di Indonesia akan terus berkurang perolehan suaranya setelah bertahun-tahun mengalami penurunan. Namun secara mengejutkan, perolehan total lima partai naik menjadi 32 persen dari 26 persen pada 2009, menurut penghitungan cepat dari lembaga riset CSIS.

Mendahului pengajuan pasangan capres-cawapres, wacana koalisi partai Islam pun kembali menguak. Dalam hal ini, banyak ormas-ormas dan organisasi kepemudaan berbasis Islam mendorong para pemimpin partai Islam untuk bersatu dalam pemilu 2014 ini. Apalagi dalam pemilu ini ada dua tokoh kuat yang diprediksi akan bertarung dalam pilpres edisi

⁴⁰ Asep Nurjaman, *Peta Baru Ideologi Partai.*, hlm.146

⁴¹ *Ibid.*

ini dan berasal dari partai nasionalis. Memang jika berfikir idealis, seharusnya partai islam bisa menjadi corong alternatif gerakan politik berbasis keislaman.

Walaupun isu mempersatukan politik Islam di satu pasangan tidak berhasil, tetapi isu pasanagan capres yang diusung oleh kelompok aliran politik Islam yang diwakili oleh Prabowo-Hatta benar-benar membuat masyarakat terbelah. Wacana bersatunya partai islam tahun ini terasa begitu berat mengingat masih kentalnya aliran politik masing-masing partai dan kebanggaan terhadap partai masih lebih besar daripada Islam itu sendiri. Islam di atas keberagaman bukannya keberagaman diatas Islam. Umat Islam Indonesia butuh sosok perekat yang bisa merekatkan perbedaan aliran ini menjadi suatu anugerah, dan tentunya butuh seorang pemimpin yang bisa mengangkat harga diri Islam ini yang sudah lama terinjak-injak dari orde baru menjadi suatu pedoman hidup di Indonesia.

Memperhatikan realitas percaturan politik nasional menjelang pilpres di atas, baik sejak tahun 2004, 2009 hingga tahun 2014 menunjukkan gejala polarisasi dalam *grass root* (kader partai) maupun elit mengenai kegamangan dalam menentukan arah koalisi. Wacana koalisi berbasis agama dan nasional tetap menjadi bagian yang tidak terhindarkan baik di tingkat elit maupun *grass root*. Oleh karena itu, pembacaan politik nasional dengan kacamata politik aliran masih sangat relevan diketengahkan.

Satu fakta yang tidak bisa dihindarkan adalah bahwa setiap bangsa memiliki agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduknya. Philipina dengan katoliknya; India dengan Hindunya; Amerika Serikat dengan Kristennya; dan Indonesia dengan Islamnya. Agama-agama tersebut menggerakkan energi kehidupan politik, tradisi, budaya, ekonomi, dan bahkan pandangan hidupnya.⁴² Tak heran jika agama-agama di sebuah negara ikut memainkan peran kunci. Tak terkecuali Indonesia. Dengan kenyataan itu, agama⁴³ tak bisa dilepaskan begitu saja dari kancah politik.

Dalam praktik, keyakinan seseorang pada agama tertentu mendorong pada pilihan-pilihan politik tertentu. Orientasi politik seseorang, khususnya di Indonesia, masih bersifat kategoris. Trikotomi Cliford Geertz tentang santri, abangan, dan priyayi dalam batas-batas tertentu masih berlaku. Kita masih menyaksikan dengan jelas, terutama di

⁴² Mudhofir Abdullah, *Radikalisme Dan Konflik Beragama Pada Pemilu Presiden 2014*, *Jurnal Dinka*, DINIKA, Volume 12. Number 1, Jan - Jun 2014, hlm. 42.

⁴³ Agama dalam pengertian ini yaitu mencakup agama terorganisir maupun agama dalam pengertian privat agama yang hanya diyakini sebagai sistem dan pandangan hidup seseorang, meskipun orang tersebut tak secara terang-terangan berafiliasi pada agama terorganisir lainnya. *Ibid*.

Jawa, bahwa seorang santri afiliasi politiknya cenderung ke PKS, PKB, PAN, PBB dan juga ke partai nasionalis yang agak hijau seperti Golkar, Demokrat, Gerindra dan atau Nasdem-Hanura. Sementara seorang abangan cenderung berafiliasi pada partai PDI-P, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan sebagian ke PAN, PKB, dan lain-lainnya. Walaupun orientasi politik ini terus-menerus berubah sejalan dengan keterbukaan informasi, namun watak dasarnya masih tetap hinggap.

E. Wacana Ortodoksi dan Heterodoksi dalam Pemberitaan Media Massa Menjelang Pilpres 2014

a. Pemberitaan Capres-Cawapres Oleh Media Nasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa menjelang pilpres 2014 terjadi polarisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut terkait dengan wacana pembentukan koalisi hingga terbentuknya koalisi yang mengerucut pada pasangan Prabowo Hatta dan Jokowi-Kalla. Kedua pasangan tersebut oleh media massa dianggap merepresentasikan golongan politik dan aliran nasional dan agama di Indonesia. Kalangan media sejatinya tidak hanya berperan dalam memberitakan peristiwa-peristiwa di sekitar pilpres, tetapi memperuncing ketegangan yang sudah dari awal mulai muncul.

Metro TV adalah milik Surya Paloh yang juga merupakan pendiri sekaligus ketua umum partai Nasdem yang pada sudah lebih dulu menentukan pilihan untuk mendukung Jokowi dan Jusuf Kalla sehingga tidak mengherankan jika mayoritas siaran mereka adalah publikasi dari kegiatan capres yang didukungnya terutama sekali mengenai pembentukan tim-tim relawan Jokowi di seluruh daerah sehingga pemirsa yang menonton siaran disini akan merasa bahwa mayoritas rakyat kita seolah-olah sudah memilih Jokowi sebagai presiden RI.

Dalam memberitakan pilpres 2014, Metro TV lebih cenderung mendukung pasangan Jokowi-Kalla ketimbang Prabowo-Hatta. Hal tersebut dapat dilihat pemberitaan Jokowi di televisi tersebut yang mendapat porsi kemunculan yang tinggi (secara frekuensi 74,4%, secara durasi 73,9%) dengan nada yang positif (31,3%). Sementara rivalnya, yakni Prabowo, yang hanya mendapat 12% (frekuensi) dan 12,2% (durasi), dengan 16,7% berita bernada negatif. Metro TV menayangkan footage Prabowo yang sedang berjoged, dalam kontrasnya dengan Jokowi yang diliput ketika sedang bekerja atau blusukan.⁴⁴

⁴⁴http://pemilubersih.org/medias/3198Independensi%20Televisi%20Menjelang%20Pemilu%20Presiden%202014%20%28bag.%20%29_REMOTIVI.pdf, diakses 5 Mei 2015.

Hal inilah yang mendasari kepentingan politik karena kita tahu bahwa Surya Paloh adalah pemilik Metro TV dan pendiri Partai Nasdem yang merupakan koalisi politik dari kubu Jokowi-JK. Keberpihakan Metro TV pada kepentingan politik sangatlah terlihat dari Konstruksi pemberitaan pada bulan Juni 2014 yang dalam intensitas penayangan pemberitaan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang diindikasikan keterlibatan Prabowo.

Begitu sebaliknya, seperti sudah diketahui oleh publik begitu juga TV one yang dimiliki oleh ketua umum Golkar yang mendukung Prabowo-Hatta sehingga siaran yang mereka ekspose ke publik lebih banyak yang bercerita tentang kegiatan capres yang didukungnya dan kebanyakan memberitakan tentang terbentuknya posko-posko atau relawan yang mendukung Prabowo sehingga ketika kita menonton siaran di sini seakan-akan Prabowo-Hatta telah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai pelosok negeri.

Dalam memberitakan pilpres, TV One lebih rajin mempublikasi kabar mengenai pasangan Prabowo-Hatta ketimbang Jokowi-JK. Sebaliknya, Metro TV rajin memberitakan Jokowi bahkan cenderung “anti” kubu Prabowo. Di TV One, Prabowo mendapat ruang yang dua kali lipat lebih banyak ketimbang Jokowi (secara frekuensi 38,4%, secara durasi 38,2%). Begitupun Aburizal Bakrie, yang mendapat 39% (frekuensi) dan 37,7% (durasi).⁴⁵ Dari total durasi berita 419 detik di ANTV, 26% di antaranya menonjolkan Bakrie (jumlah tersebut adalah penonjolan tertinggi di ANTV). Hal yang serupa juga terjadi di TV One. Dari jumlah durasi berita 11.681 detik, 12,3% diantaranya menonjolkan Bakrie (ini adalah jumlah penonjolan tertinggi di TV One).

b. Wacana Ortodoksi dan Heterodoksi dalam Pemberitaan Media Massa

Pemilu Presiden 2014 ini hanya diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres. Ini pertamakalinya terjadi dalam sejarah Pilpres sejak 2004. Dengan demikian kompetisi dua pasangan ini bersifat head to head dan sangat ketat. Didukung oleh partai-partai koalisi pengusung, dua pasangan Pilpres kali ini membelah dua kubu dengan polarisasi yang sangat tajam. Prabowo-Hatta merepresentasikan sayap hijau dan Jokowi-JK mengartikulasikan sayap merah. Meski dua pasangan tersebut semua beragama Islam, tapi publik membacanya sebagai kompetisi antara sayap hijau dan sayap merah.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Mudhofir Abdullah, *Radikalisme Dan Konflik Beragama.*, hlm. 55

Karena itu, Pilpres 2014 ini rentan terhadap konflik horisontal. Konflik ini bisa dipicu oleh kecurigaan antar kelompok umat beragama baik antar maupun intra. Jika diperhatikan berita-berita di media sosial seperti dicontohkan oleh dua media di atas, isu-isu SARA menjadi salah satu pemberitaan yang terang-terangan dikemukakan. Para oknum tak segan-segan mencurigai kelompok lain sebagai kepanjangan tangan dari Kristen, China dan atau Barat. Bahkan menyatakan bahwa jika salah satu pasangan ini menang, maka akan ada huru-hara sebagai protes. Sebagian lainnya memandang bahwa pertarungan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta adalah artikulasi dari pertarungan kaum ortodoks dan heterodoks.

Prabowo seperti diwacanakan dalam pemberitaan media terutama *vian.co.id* direpresentasikan sebagai kaum santri dengan basis dukungan partai santri. Sementara Jokowi direpresentasikan sebagai sosok abangan yang didukung oleh pengusung utamanya adalah PDIP. Pemetaan seperti itu terlihat jelas dari framing yang dimuat oleh *viva.co.id* yang dicounter oleh pemberitaan *Metrotvnews.com* yang lebih condong ke pasangan Jokowi-JK.

Polarisasi dan kecenderungan pemetaan ortodoksi dan heterodoksi juga disebarkan melalui forum-forum khutbah, pengajian di majelis taklim, perbincangan di tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. Juga dapat diakses di mediasosial (*facebook*, *twitter*, maupun *blog*). Secara semiotika, berita-berita tersebut menunjukkan sebuah potensi dan bahaya laten yang ada di tengah-tengah masyarakat. Juga menunjukkan bahwa musuh-musuh imajiner telah ada di alam bawah sadar mereka dan sedang diincar untuk dilawan bila saatnya tiba.

Relasi oposisi biner antara santri dan abangan pada pentas demokrasi Pilpres 2014 kembali muncul. Meskipun jumlahnya kecil, namun untuk tujuan-tujuan politik teori konspirasi ini bisa sangat efektif memainkan konflik horisontal. Potensi konflik memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi konflik terbuka. Ini ditunjukkan oleh *black campaign* dari para oknum yang dikaitkan dengan isu-isu SARA. Hal tersebut memperparah suhu politik nasional menjelang detik-detik pemungutan suara.⁴⁷

Ketegangan tersebut misalnya terbukti ketika Wakil Pemimpin Redaksi *tvOne* Totok Suryanto harus membuat klarifikasi kepada PDIP mengenai berita yang seakan-akan dibuat *TVOne* untuk menyudutkan capres Jokowi-JK. Dalam klarifikasinya Totok mengatakan bahwa tidak

⁴⁷ Isu SARA yang sempat muncul misalnya saling tuding antara Pendukung Presiden Jokowi-JK dengan *Tvone* soal pemberitaan tentang PKI.

ada pemberitaan yang mengaitkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam keterangannya, Totok menilai, hal itu terjadi karena kesalahpahaman semata. Dia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan PDI Perjuangan.

Menanggapi hal tersebut, tersiar kabar bahwa Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta kepada semua kader partai banteng moncong putih siaga satu. Seruan Tjahjo ini untuk merespon pemberitaan stasiun tvOne yang menyebutkan seolah-olah partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu mengusung kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Seruan itu langsung dijawab oleh massa simpatisan PDI Perjuangan Yogyakarta. Mereka mengepung kantor perwakilan tvOne di Yogyakarta, hari Rabu (2/7/2014) malam waktu setempat dan melakukan aksi unjuk rasa dan corat-coret.⁴⁸

Isu PKI salah satu segelintir isu yang membuat ketegangan meningkat antara kubu Prabowo di satu sisi dan kubu Jokowi-JK di sisi lain. Jika melihat pemetaan orientasi politik orang Indonesia dengan menggunakan kategori Clifford Geertz tentang santri, abangan, dan priyayi, polarisasi dukungan tersebut masih terlihat jelas. Hal tersebut misalnya dapat disaksikan dengan jelas terutama di Jawa, bahwa seorang santri afiliasi politiknya cenderung ke Prabowo-Hatta. Sementara seorang abangan cenderung berafiliasi pada pasangan Jokowi-JK.

Dalam konteks Pilpres 2014, koalisi pendukung Jokowi-JK adalah kelompok “abangan” selain PKB. Sementara di kubu Prabowo-Hatta adalah barisan “santri” yang mengusung simbolisme agama. Deklarasi antara dua pasangan tersebut pun menghadirkan warna yang kontras. Jokowi-JK tidak pakai peci dan simbol-simbol agama, sementara pasangan Prabowo-Hatta mengusung simbol-simbol agama dengan asesoris santri. Pandangan ini tentu mendorong sentimen-sentimen politik dan menghadirkan perasaan keterikatan pada orientasi politik berbalut keyakinan agama.

Pilpres 2014 dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah menciptakan polarisasi tajam antara faksi-faksi agama dan golongan. Meski sebenarnya di dalam dua kubu ada kelompok-kelompok yang berbeda dan mencerminkan warna pelangi, namun bagi banyak orang dibaca tidak demikian. Kristen, NU, non-pri,

⁴⁸ “Ini Penjelasan Tvone soal pemberitaan PDIP usung kader PKI”, <http://www.suara.com/news/2014/07/03/000101/ini-penjelasan-tvone-soal-pemberitaan-pdip-usung-kader-pki>, diakses 14 Mei 2015.

dan abangan dianggap berada di kubu Jokowi-JK. Islam, Muhamadiyah, Santri, pribumi dipandang berada di kubu Prabowo-Hatta.

Trikotomi ini kini dengan kental mewarnai persepsi publik, meski kalangan terpelajar mungkin tidak membaca demikian. Tapi dalam sejumlah media sosial dan blog dikategorikan sebagai pertarungan dua kubu yang bersifat diametral. Dengan menganalisis media, tersirat bahwa ada tiga pandangan besar tentang kompetisi antara Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta. Pertama, kelompok yang memandang sebagai kompetisi antara Kristen vs Islam. Ini dianut oleh sebagian besar kelompok-kelompok Islam radikal (bahkan dari sejumlah akademisi). Juga kelompok-kelompok yang terprovokasi oleh media sosial dan memercayainya sebagai sebuah fakta.

Kedua, golongan yang membaca sebagai kompetisi antara NU vs Muhammadiyah. Ini dianut oleh faksi-faksi NU baik dari kalangan awam maupun akademisi. Hatta Rajasa dan Amien Rais yang selalu tampil bersama Prabowo dianggap sebagai representasi dari Muhammadiyah dan PAN. Sebagian elit NU merasa terancam jika kubu ini terpilih dan posisi-posisi strategis di Kementerian Agama akan sulit dipertahankan.⁴⁹

Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap alih kekuasaan selalu ada kerusuhan dan memakan korban sasaran utamanya adalah agama minoritas dan suku minoritas. Meski pelakunya belum tentu dua kelompok ini, namun agitasi-agitasi mereka ikut berkontribusi pada pecahnya konflik horisontal. Mereka juga termasuk kelompok yang solid. Di kampus, di masjid, dan tempat-tempat tertentu selalu mengadakan halaqah dan membicarakan isu-isu yang hangat. Mereka memercayai pada hanya guru-guru mereka yang ditokohkan dan merupakan founding father gerakan mereka.

Jadi, mereka hanya membaca buku-buku di dalam lingkaran jaringan mereka saja. Mereka tidak keluar dari cangkang jaringan mazhabnya sehingga tak pernah memperoleh wawasan-wawasan lain yang lebih kritis. Dengan terkurung pada jaringan mazhab mereka, maka sulit keluar dari prasangka-prasangka terhadap the others atau sang liyan.⁵⁰

Dari sinilah nilai-nilai demokrasi menjadi mustahil untuk dipahami mereka dengan jernih. Mereka apriori dan menempatkan diri mereka di tempat Tuhan yang selalu benar. Mereka jatuh pada sikap otoritarianisme baik dalam politik maupun dalam menafsirkan teks-teks kitab suci.⁵¹

⁴⁹ Mudhofir Abdullah, *Radikalisme Dan Konflik Beragama.*, hlm. 59

⁵⁰ Mudhofir Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Jakarta: Inti Medina, 2009), hlm.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 46

Dalam konteks Pilpres 2014, proses demokrasi bisa terseok-seok bila kelompok ini menghadang proses-prosesnya melalui agitasi-agitasi anti-demokrasi. Itulah sebabnya, mereka kini paling kritis terhadap Wakil Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama yang beragama Kristen dan memimpin mayoritas warga Muslim di Jakarta. Mereka tidak bisa menerima demokrasi yang memilih pasangan Jokowi-Ahok. Karena pasangan ini legal dan menang yang didukung oleh warga Jakarta, maka mereka hanya memendam kekecewaan. Kekecewaan ini terus dibawa hingga Pilpres 2014 yang mengusung Jokowi menjadi Capres PDI-P.

Di media sosial, blog, dan juga sms-sms gelap, isu SARA tentang Ahok yang akan menggantikan Jokowi jika ia menang dalam Pilpres ini menunjukkan potensi kerusuhan. Di antara isi sms dan pesan facebook adalah pesan yang memojokkan Jokowi dan Ahok. Jokowi dianggap bertanggung jawab atas kondisi Jakarta yang akan dipimpin seorang Kristiani. Jokowi juga dianggap mewarisi Wakil Walikota yang beragama Kristen di Solo. Berita-berita yang bernada SARA ini mengancam keamanan negara dan ketertiban sosial. Pilpres kali ini, karena itu, memiliki ancaman yang jauh lebih serius ketimbang tahun 2004 dan 2009.

Sementara itu, dalam pembicaraan kaum radikal di Solo, misalnya, Prabowo dianggap tidak lebih baik dari Jokowi dilihat dari asal-usul agama keluarganya. Keluarga Prabowo oleh mereka dianggap tidak jelas. Ibu dan keluarganya diisukan masih beragama Kristen dan menurut mereka tidak layak untuk memimpin umat Islam Indonesia.

Namun mereka masih menerima Prabowo Subianto sebagai pilihan terbaik dari dua keburukan (dari sisi agama). Apalagi setelah Prabowo berkoalisi dengan partai-partai Islam, kaum radikal mau menerima dan memahami. Nada curiga kaum radikal terhadap Capres, tentu saja, mengartikulasikan ketidakpercayaan pada proses demokrasi. Ini menjadi lanskap yang mewarnai proses Pilpres 2014 dengan suhu politik sangat hangat. Perlu ditambahkan bahwa kaum radikal membaca situasi politik Pilpres di Tanah Air dengan kaca mata politik internasional, terutama tentang dunia Islam. Gerakan mereka bersifat transnasional.

Mereka membaca isu-isu dunia Islam yang dianggap telah dizalimi oleh politik konspirasi Barat-Kristen-Yahudi. Berita-berita tentang situasi politik Timur Tengah seperti: konflik Israel-Palestina, tergulingnya mantan presiden Mesir Muhamad Nursi, dan terjadinya Arab Spring dibaca sebagai produk dari konspirasi Yahudi-Barat. Jadi, kaum radikal di sini dipenuhi kecurigaan karena mencampurkannya dengan situasi politik dunia. Dengan cara baca semacam ini musuh-musuh imajiner kaum radikal akan terus lahir dan mereka pun terus bergerak tanpa henti. Kaderisasinya cukup sistematis dan kini telah “merebut” masjid-masjid

atau mushala-mushala yang sudah ditinggalkan oleh jamaah NU dan Muhammadiyah yang mulai sibuk berpolitik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sebuah masjid yang awalnya independen kemudian diklaim sebagai masjidnya kelompok kaum radikal. Harus dipahami bahwa kaum radikal lebih intens berada dan mengadakan kegiatan di masjid-masjid ketimbang kelompok manapun. Masjid telah menjadi base camp dan bila tidak ada pembinaan akan menjurus pada terbentuknya kantong-kantong radikalisme.

Gejala sebagaimana ditunjukkan di atas, menurut Mudhafir Abdullah dapat dilihat dengan mata telanjang. Apalagi kampus-kampus, terutama dari perguruan tinggi umum, khalaqah-khalaqah begitu marak. Tentu saja, tidak semua khalaqah itu radikal. Tetapi, bila pemimpinnya radikal maka kerumunan itu bisa terpengaruh menjadi radikal. Infiltrasi ideologi dan teologi sangat mudah masuk pada khalaqah-khalaqah, misalnya, melalui kajian tafsir yang sudah dikerangkeng ke arah radikalisme.

F. Penutup

Berdasarkan pembahasan terhadap politik Aliran Islam di Indonesia menunjukkan secara umum peta politik di Indonesia belum berubah secara signifikan. Peta politik Islam yang ada menunjukkan adanya kecenderungan kalangan pemilih ortodoks yang masih mempertahankan motif lama dalam pentas politik nasional. Mereka mempertahankan alasan memilih berdasarkan landasan keagamaan (Islam). Selanjutnya, kalangan modernis atau heterodoks yang berpendapat bahwa Islam tidak mempunyai sistem negara yang detail tetapi di dalamnya terdapat nilai etika kehidupan bernegara. Hal tersebut nampak jelas dari pilihan politik di masyarakat Islam yang tidak mepedulikan siapa tokoh yang dipilih. Mereka memilih berdasarkan kecenderungan hubungan-hubungan kultural atau dengan kata lain tidak terpengaruh oleh tendensi agama.

Politik aliran dalam konteks politik Indonesia masih dapat dirasakan hingga menjelang pilpres 2014. Dalam konteks Pilpres 2014, koalisi pendukung Jokowi-JK adalah kelompok “abangan” selain PKB. Sementara di kubu Prabowo-Hatta adalah barisan “santri” yang mengusung simbolisme agama. Deklarasi antara dua pasangan tersebut pun menghadirkan warna yang kontras. Jokowi-JK tidak pakai peci dan simbol-simbol agama, sementara pasangan Prabowo-Hatta mengusung simbol-simbol agama dengan asesoris santri.

Wacana ortodoksi dan heterodoksi Islam dalam pemberitaan media menjelang pemilihan presiden 2014. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pilpres kali ini ada dua kubu dengan polarisasi yang tajam, hal ini

dapat dilihat dari media online sebagai wadah pemberi informasi kepada masyarakat. Kubu Jokowi-JK mempresentasikan sebagai sayap merah (heterodoksi) sementara kubu Prabowo-Hatta sebagai sayap hijau (ortodoksi), hal ini berdasarkan polarisasi aliran partai yang menjadi koalisi. Berikut ini contoh nyata dari adanya wacana ortodoksi dan heterodoksi pemberitaan media. Prabowo seperti diwacanakan dalam pemberitaan media terutama *viva.co.id* direpresentasikan sebagai kaum santri dengan basis dukungan partai santri. Sementara Jokowi direpresentasikan sebagai sosok abangan yang didukung oleh pengusung utamanya adalah PDIP. Pemetaan seperti itu terlihat jelas dari framing yang dimuat oleh *viva.co.id* yang dicounter oleh pemberitaan *Metrotvnews.com* yang lebih condong ke pasangan Jokowi-JK.

Dengan menganalisis media, tersirat bahwa ada tiga pandangan besar tentang kompetisi antara Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta. *Pertama*, kelompok yang memandang sebagai kompetisi antara Kristen vs Islam. Ini dianut oleh sebagian besar kelompok-kelompok Islam radikal (bahkan dari sejumlah akademisi). Juga kelompok-kelompok yang terprovokasi oleh media sosial dan memercayainya sebagai sebuah fakta. *Kedua*, golongan yang membaca sebagai kompetisi antara NU vs Muhammadiyah. Ini dianut oleh faksi-faksi NU baik dari kalangan awam maupun akademisi. Hatta Rajasa dan Amien Rais yang selalu tampil bersama Prabowo dianggap sebagai representasi dari Muhammadiyah dan PAN. Sebagian elit NU merasa terancam jika kubu ini terpilih dan posisi-posisi strategis di Kementerian Agama akan sulit dipertahankan. *Ketiga*, dalam pembicaraan kaum radikal di Solo, misalnya, Prabowo dianggap tidak lebih baik dari Jokowi dilihat dari asal-usul agama keluarganya. Keluarga Prabowo oleh mereka dianggap tidak jelas. Ibu dan keluarganya diisukan masih beragama Kristen dan menurut mereka tidak layak untuk memimpin umat Islam Indonesia. Namun mereka masih menerima Prabowo Subianto sebagai pilihan terbaik dari dua keburukan (dari sisi agama). Apalagi setelah Prabowo berkoalisi dengan partai-partai Islam, kaum radikal mau menerima dan memahami.

Dalam kerangka kehidupan bernegara, mestinya media dapat berperan konstruktif. Pemberitaan yang dihadirkan oleh dua media online yang mewakili media televisi mainstream menunjukkan sebaliknya. Keduanya sama-sama memiliki dukungan politik, sehingga pemberitaannya tidak balance atau tidak berimbang. Penelitian ini hanya mengandalkan data online dan data-data sekunder lainnya, oleh karena itu perlu diadakan penelitian lanjutan dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berkiprah secara langsung pada pilpres 2014 untuk mendapatkan gambaran secara utuh.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir, *Jihad Tanpa Kekerasan*, Jakarta: Inti Medina, 2009.
- Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- E. Ramage, Douglas, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. ke-1, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Effendi, Bahtiar, (RE) *Politisasi Islam, Pernahkah Islam Berbenti Berpolitik?*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2000.
- Effendi, Bahtiar, dan Fachry Ali, *Merambab Jalan Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1986
- Deliar Noer, *Pengantar ke pemikiran politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, Magelang: IndonesiaTera, 2001
- Rahardjo, M. Dawam *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung:Mizan, 1993.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, cet. ke-1 Bandung: Teraju, 2002.
- Sjadzali, Munawir , *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: UI, 1990.
- Budhy, Rachman Munawar, Moh Shofan, *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2003.
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta: Kencana Predana Group, 2008.
- Eriyanto. *Analisis Wacana*.Yogyakarta.LKiS.2000.
- Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- G. Ritzer & Goodman, *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.

- Herbert Feith & Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Imawan, Riswanda, *Membangun Demokrasi Indonesia. Dalam Siburian e al (eds). Indonesia Raya Bangkit atau Hancur*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2004
- Mahfud MD, Moh., *Konfigurasi Politik dan Hukum pada Era Orde Lama Dan Orde Baru*, dalam, M. AS. Hikam, dkk., *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999.
- Putra, Dedi Kurnia Syah, *Media dan Politik Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis –Mutualisme Media dan Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Suryadinata, Leo, *Negara dan Etnis Tionghoa (Kasus Indonesia)*, Jakarta: LP3ES, 2002
- Dhakidae, Daniel *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Starategi dan Program* ,Jakarta. Tim Litbang Kompas, 1999
- Uhlen, Anders, alih Bahasa Rofik Suhud, *Oposisi Berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1998.
- Asep Nurjaman, *Peta Baru Ideologi Partai Politik Indonesia*, 2009.dalam ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/.../130_umm_scientific_journal.do
- Mudhofir Abdullah, Radikalisme Dan Konflik Beragama Pada Pemilu Presiden 2014, DINIKA, Volume 12. Number 1, Jan - Jun 2014
- http://pemilubersih.org/medias/3198Independensi%20Televisi%20Menjelang%20Pemilu%20Presiden%202014%20%28bag.%20%29_REMOTIVI.pdf, diakses 5 Mei 2015
- http://www.ui.ac.id/download/kliping/141108/Gagasan_Koalisi_PDIP-PAKS.pdf, diakses 19 Mei 2015.